

Kotak Hitam Pesawat China Eastern yang Jatuh Rusak Parah

BEIJING (IM) - Sebuah kotak hitam (black box) pesawat penumpang Boeing 737-800 milik maskapai China Eastern Airlines yang jatuh, telah ditemukan.

Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (23/3), juru bicara otoritas penerbangan RRT, Liu Lusong mengatakan, "sebuah perekam penerbangan dari China Eastern MU5735 ditemukan pada 23 Maret". Media pemerintah kemudian menyatakan bahwa black box tersebut rusak parah.

Boeing 737-800 dilengkapi dengan dua perekam penerbangan: satu di kabin penumpang belakang yang melacak data penerbangan, dan satu lagi perekam suara kokpit. "Saat ini, tidak jelas apakah itu perekam data atau perekam suara kokpit yang telah ditemukan, kata Mao Yanfeng, seorang pejabat di Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC), menurut media pemerintah.

Pesawat dengan penerbangan MU-5735 itu jatuh dari ketinggian 29.100 kaki dan menghantam area pegunungan di Kota Wuzhou, Provinsi Guansi

ketika melakukan perjalanan dari Kunming ke Guangzhou pada Senin (21/3).

Jatuhnya pesawat yang membawa 132 orang itu memicu kebakaran di area pegunungan sekitarnya. Ini menjadi kecelakaan udara paling mematikan dalam sejarah RRT selama 30 tahun terakhir.

Zhu Tao, direktur keamanan penerbangan Badan Penerbangan Sipil RRT mengatakan dengan kerusakan yang begitu parah, akan sulit untuk mengetahui mengapa pesawat jatuh dari ketinggian terbang 30 ribu kaki di atas permukaan laut.

Pihak berwenang RRT masih belum menemukan penjelasan penyebab kecelakaan pesawat Boeing 737-800 tersebut. Di antara 132 penumpang dan pesawat yang terbang menuju kota Kunming, ibu kota provinsi Yunnan tersebut, tidak ada satu pun yang selamat.

Lokasi jatuhnya pesawat dikelilingi oleh tiga sisi kawasan pegunungan dan hanya bisa didatangi dengan berjalan kaki dan sepeda motor, di jalan yang curam dan terjal di kawasan semi-tropis Guansi, yang memiliki pemandangan yang indah. ● tom



BENCANA TORNADO DI TEXAS – AMERIKA SERIKAT

Seorang wanita berjalan melalui rumah yang hancur setelah tornado pada gambar yang diambil dengan drone di Round Rock, Texas, Amerika Serikat, Selasa (22/3).

Utusan ASEAN Ingin Diberi Akses untuk Bertemu Suu Kyi

Prak Sokhonn memahami bahwa para kritikus memandang perjalanannya ke Myanmar pekan ini sebagai bentuk melegitimasi junta. Namun menurutnya kunjungan dua hari itu merupakan langkah positif menuju penyelesaian krisis, yang menurutnya tidak dapat dilakukan hanya selama kepemimpinan Kamboja di ASEAN tahun ini.

NAYPYIDAW (IM) - Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar yakni Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn telah tiba di Myanmar awal pekan ini dalam upaya mengakhiri gejolak politik di negara itu. Dalam pembicaraan-

ya dengan pemimpin junta, ia mendesak militer untuk menahan diri dalam serangan ke warga sipil.

Prak Sokhonn juga membahas soal akses untuk bertemu pemimpin terguling Aung San Suu Kyi. Namun militer

tetap tidak mengizinkannya dan mengatakan, tidak akan ada akses ke Suu Kyi selama persidangannya berlangsung.

Prak Sokhonn juga meminta pembebasan tahanan termasuk ekonom Australia Sean Turnell. Kemudian komandan junta Min Aung Hlaing mengatakan kepadanya bahwa dia akan mempertimbangkan permintaan untuk melihat Suu Kyi dan tahanan lainnya di waktu mendatang.

Suu Kyi digulingkan oleh militer dalam kudeta 1 Februari. Usai kudeta, krisis politik kacau dan pertumpahan darah tidak terhentikan di negara yang setelah satu dekade reformasi demokrasi tentatif.

Pemenang Nobel diadili untuk puluhan pelanggaran termasuk melanggar undang-undang rahasia negara dan

berbagai tuduhan korupsi. Dia telah dinyatakan bersalah atas beberapa kejahatan, tetapi telah menolak semua tuduhan.

Prak Sokhonn memahami bahwa para kritikus memandang perjalanannya ke Myanmar pekan ini sebagai bentuk melegitimasi junta. Namun menurutnya kunjungan dua hari itu merupakan langkah positif menuju penyelesaian krisis, yang menurutnya tidak dapat dilakukan hanya selama kepemimpinan Kamboja di ASEAN tahun ini.

"Masalah Myanmar rumit, perlu waktu lama untuk diselesaikan, kami tidak dapat menyelesaikannya selama satu kepemimpinan atau kepemimpinan saat ini. Saya tahu dari berbagai tingkat harapan pada kunjungan itu, saya juga tahu orang-orang yang ingin

melihat gencatan senjata dan saya bertemu semua pihak yang terlibat, dan kembali ke normalnya demokrasi," kata Sokhonn kepada media sekembalinya ke Kamboja.

Merujuk pada junta, ia menambahkan, "Saya mengerti alasan di balik kritik, mereka tidak ingin saya memberikan legitimasi kepada anggota dewan negara bagian."

ASEAN telah melarang para jenderal menghadiri pertemuan puncaknya sampai mereka melihat kemajuan konsensus lima poin yang disepakati tahun lalu untuk mengakhiri kekerasan. PBB pekan lalu mengatakan tentara telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dengan sengaja menargetkan warga sipil. Namun militer belum menanggapi. ● tom

Terus Digempur Rusia, Mariupol Bagi 'Neraka' di Bumi

KIEV (IM) - Situasi kota Mariupol di Ukraina yang dikepung pasukan Rusia dilaporkan semakin mengkhawatirkan. Seorang anggota parlemen setempat menyebut situasi di kota Mariupol bagi 'neraka di bumi'.

BBC melaporkan, Rabu (23/3), Yaroslav Zhelezniak yang merupakan anggota parlemen dari Mariupol menyatakan kekhawatiran semakin memuncak soal situasi kemanusiaan di kota pelabuhan di tepi Laut Azov tersebut. "Neraka di Bumi," sebut Zhelezniak soal situasinya di Mariupol.

Komentar senada disebutkan seorang pengusaha bernama Dmytro yang berhasil meninggalkan kota Mariupol pada Selasa (22/3) waktu setempat. Menurut Dmytro, warga setempat yang sangat kelaparan terpaksa membunuh anjing liar untuk dimakan.

Dmytro mengatakan, teman-temannya menyebut tindakan putus asa semacam itu dilakukan dalam beberapa hari terakhir karena pasokan makanan telah habis. "Anda mendengar kata-katanya, tapi tidak mungkin untuk benar-benar menerimanya, untuk mempercayai ini terjadi. Ini adalah neraka di bumi," ucap Dmytro seperti dilansir Financial Times.

Mariupol merupakan target strategis utama bagi militer Rusia yang menginvasi Ukraina. Warga kota pelabuhan itu telah menghadapi gempuran Rusia selama beberapa pekan terakhir, tanpa mendapatkan pasokan listrik maupun air mengalir.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan terbaru menyebut seperempat populasi kota tersebut, atau sekitar 100.000 orang, masih terjebak dalam 'kondisi tidak manusiawi'. Pasokan makanan mulai menipis dan bantuan kemanusiaan diblokir untuk masuk ke kota yang kini dikepung pasukan Rusia itu.

Dalam pidato Selasa (22/3)

tengah malam, Zelensky menggambarkan kengerian yang dialami penduduk Mariupol: "Tidak ada makanan. Tidak ada air. Tidak ada obat-obatan. Di bawah gempuran terus-menerus, di bawah pengepungan terus-menerus."

Sejumlah pejabat Ukraina menuturkan bahwa penduduk Mariupol menghabiskan sebagian besar waktu di dalam penampungan dan ruang bawah tanah, selama pasukan Rusia melanjutkan gempurannya dari darat, udara dan laut.

Gambar-gambar dari kota itu menunjukkan reruntuhan, dengan seluruh lingkungan hancur. Wali Kota Mariupol, Vadym Boychenko, memperkirakan lebih dari 80 persen gedung permukiman telah rusak atau hancur, dengan sepertiganya tidak bisa diperbaiki.

Yang lebih mengerikan, jenazah-jenazah korban tewas ditinggalkan begitu saja di jalanan karena terlalu berbahaya untuk mengevakuasinya di tengah gempuran Rusia.

Salah satu laporan Human Rights Watch yang dirilis pada Senin (21/3) menggambarkan kota Mariupol sebagai 'pemanasan neraka yang dipenuhi mayat dan gedung-gedung hancur'.

Zelensky dalam pernyataannya menyebut bahwa para pejabat Ukraina dan sekutu-sekutu tengah melakukan yang terbaik untuk membawa masuk bantuan ke Mariupol dan mengevakuasi warga sipil keluar. Dia menambahkan bahwa orang-orang yang kabur diserang di sepanjang koridor kemanusiaan yang disepakati.

Bahkan konvoi kemanusiaan ditangkal pasukan Rusia. Disebutkan Zelensky bahwa para relawan darurat dan sopir bus konvoi kemanusiaan dijadikan tahanan.

"Kami melakukan semuanya yang kami bisa untuk membebaskan rakyat kami dan membuka blokir pergerakan bantuan kemanusiaan," tegasnya. ● ans

AS dan Negara Barat Pertimbangkan Cabut Keanggotaan Rusia dari G20

WASHINGTON (IM) - Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya dilaporkan mempertimbangkan, apakah Rusia harus tetap berada dalam kelompok ekonomi utama Kelompok G20 setelah invasinya ke Ukraina.

Tapi nampaknya tekanan untuk menendang Rusia akan diveto negara anggota lain seperti RRT, India dan Arab Saudi. Tema ini meningkatkan prospek beberapa negara akan absen dari pertemuan G20 tahun ini.

G20 bersama dengan Kelompok G7, yang hanya terdiri dari AS, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang dan Inggris, adalah platform internasional utama untuk mengkoordinasikan segala hal mulai dari aksi perubahan iklim hingga utang lintas batas.

Rusia saat ini menghadapi banyak sanksi internasional yang dipimpin oleh negara-negara Barat, yang bertujuan untuk mengisolasi dari ekonomi global, termasuk secara khusus menutupnya dari sistem pembayaran bank global SWIFT dan membatasi transaksi oleh bank sentralnya.

"Ada diskusi tentang apakah pantas bagi Rusia untuk menjadi bagian dari G20. Jika Rusia tetap menjadi anggota, itu akan menjadi organisasi yang kurang berguna," kata sumber senior G7 dikutip dari kantor berita Reuters.

Ketika ditanya apakah Presiden AS Joe Biden akan bergerak untuk mendorong Rusia keluar dari G20 saat dia bertemu dengan sekutu di Brussels pada hari Jumat (25/3), penasihat keamanan nasional Jake Sullivan secara diplomatis mengatakan, AS berencana untuk berkonsultasi dengan sekutunya.

"Kami percaya bahwa itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa untuk Rusia di lembaga internasional dan dalam komunitas internasional," kata Sullivan di Gedung Putih, Selasa (22/3).

Menanggapi hal ini, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiova, mengatakan Presiden Vladimir Putin tetap berencana hadir dalam KTT G20 yang akan berlangsung di Bali akhir 2022 ini.

Sebuah sumber Uni Eropa secara terpisah mengkonfirmasi pembahasan tentang status Rusia pada pertemuan G20 mendatang, yang kursi kepemimpinannya saat ini dipegang Indonesia.

"Sudah sangat jelas bagi Indonesia, kehadiran Rusia pada pertemuan tingkat menteri yang akan

datang akan sangat bermasalah bagi negara-negara Eropa," kata sumber tersebut, seraya menambahkan tidak ada proses yang jelas untuk mengecualikan suatu negara.

Polandia pada hari Selasa (22/3) menyatakan, telah menyarankan kepada pejabat perdagangan AS bahwa mereka bisa menggantikan Rusia dalam kelompok G20 dan saran itu telah menerima "tanggapan positif".

"Selama pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, kami membuat pengajuan untuk mengecualikan Rusia dari G20, yang diterima dengan respons positif dan persetujuan, dan hal ini akan diserahkan kepada Presiden Biden," ujar Menteri Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Polandia Piotr Nowak.

Pejabat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa mengatakan, banyak delegasi di sana menolak untuk bertemu delegasi Rusia. "Banyak pemerintah telah mengajukan keberatan atas apa yang terjadi di Ukraina, dan keberatan ini telah terwujud dalam kurangnya keterlibatan dengan anggota yang bersangkutan," kata juru bicara WTO Keith Rockwell. ● ans



ROCK GARDEN LAMBANG UKRAINA

Alexander Izman membuat sebuah "Rock Garden" setiap hari di pantai di tengah darurat militer saat invasi Rusia ke Ukraina, ia berpose dengan salah satu pahatan batunya dalam bentuk lambang Ukraina, trisula, di Odesa, Ukraina, Selasa (22/3).

Selandia Baru Cabut Sebagian Besar Mandat Vaksin

WELLINGTON (IM) - Pemerintah Selandia Baru pada Rabu (23/3) mengatakan akan mencabut mandat vaksin untuk sejumlah sektor kerja, termasuk pengajaran dan kepolisian, mulai 4 April. Langkah itu diambil pemerintah Selandia Baru ketika wabah Covid-19 di negara itu saat ini mendekati puncaknya.

Tanggapan Selandia Baru terhadap pandemi mendapat pujian di luar negeri. Negara itu selama ini mampu menjaga agar jumlah pasien rawat inap dan kematian akibat Covid-19 tetap rendah.

Namun, kemarahan publik telah tumbuh atas langkah-langkah pembatasan di dalam negeri yang berkelanjutan. Kemarahan itu mencapai klimaks pada awal Maret dalam aksi protes yang diwarnai kekerasan di luar gedung legislatif Selandia Baru di Wellington.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada konferensi pers mengatakan, hanya orang-orang yang bekerja dengan kelompok yang rentan, seperti perawatn warga lanjut usia dan sektor kesehatan serta pekerja perbatasan, yang perlu divaksin mulai 4 April.

"Kartu tanda vaksin juga tidak lagi diwajibkan untuk warga yang ingin mengunjungi restoran, kedai kopi dan ruang publik lainnya. Dengan lebih banyak alat dan sebagai salah satu negara dengan populasi yang paling banyak divaksin di dunia, kita dapat terus bergerak maju dengan aman," ujar Ardern saat men-

gumunkan pencabutan sebagian besar aturan mandat vaksin.

Lebih dari 95 persen populasi Selandia Baru yang berusia di atas usia 12 tahun kini telah menerima dua dosis vaksin untuk kekebalan terhadap Covid-19.

Namun saat negara berpenduduk lima juta jiwa itu mencatat lebih dari 500.000 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi, virus korona kini menyebar luas.

Ardern mengatakan puncak wabah di kota terbesar Selandia Baru, Auckland, sekarang telah berlalu dan seluruh negeri diperkirakan akan mengalami puncak wabah sebelum mandat vaksin dapat segera dicabut pada 5 April.

"Dengan turunnya jumlah kasus, inilah saatnya kami untuk mengambil langkah selanjutnya dengan keyakinan pada kekebalan dan perlindungan kolektif yang telah kita bangun," katanya.

Langkah pencabutan sebagian besar aturan mandat vaksin itu dilakukan seminggu setelah pemerintah Selandia Baru mengumumkan akan membuka perbatasan negara bagi warga Australia mulai pertengahan April 2022.

Perbatasan negara juga akan dibuka bagi warga asing lainnya yang masuk dalam program visa-waiver mulai Mei 2022. Visa-waiver adalah program yang memungkinkan warga dan negara tertentu untuk melakukan perjalanan ke negara lain untuk kepentingan pariwisata, bisnis, atau saat transit hingga 90 hari tanpa harus mendapatkan visa. ● ans



PASUKAN PRO-RUSIA

Seorang anggota pasukan pro-Rusia berseragam tanpa rencana menangani mortir di depot senjata selama konflik Ukraina-Rusia dekat Marinka, di Wilayah Donetsk, Ukraina, Selasa (22/3).

Jurnalis Rusia Diselidiki Gegara Laporan Soal Gempuran ke RS Ukraina

MOSKOW (IM) - Seorang jurnalis Rusia diselidiki atas tuduhan menyebar 'hoax' soal militer Rusia menggempur sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol, Ukraina. Jurnalis yang kini dicari pihak berwenang Rusia itu dilaporkan tinggal di luar Rusia.

AFP melansir pada Rabu (23/3), Alexander Nevzorov menjadi reporter politik terkemuka pertama yang diselidiki atas tuduhan menyebarkan informasi 'palsu' soal militer Rusia di bawah undang-undang (UU) baru yang diberlakukan usai Presiden Vladimir Putin mengirim tentara ke Ukraina pada 24 Februari.

Penyelidikan kasus kriminal terhadap Nevzorov itu diumumkan Komisi Investigatif Rusia pada Selasa (22/3) waktu setempat. "Nevzorov dengan sengaja mempublikasikan informasi palsu soal gempuran yang disengaja oleh Angkatan Bersenjata Rusia terhadap sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol. Publikasi itu disertai foto-foto tidak akurat soal warga sipil yang terdampak gempuran," demikian pernyata-

an para penyidik pada Komisi Investigatif Rusia, sembari menambahkan bahwa foto-foto itu telah dipublikasikan terlebih dulu oleh media Ukraina.

Pengumuman Komisi Investigatif itu disampaikan saat invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-27 sejak diluncurkan pada akhir Februari lalu. Rusia menyebut aksinya di Ukraina sebagai 'operasi militer khusus'.

Laporan media juga menyebutkan invasi Rusia menewaskan ribuan orang dan memaksa 10 juta orang mengungsi. Dalam pernyataannya, para penyidik Rusia juga menyatakan tengah mencari tahu keberadaan Nevzorov.

Nevzorov (63) adalah jurnalis veteran Rusia dan mantan anggota parlemen Rusia. Dia diyakini kini tinggal di luar Rusia.

Pekan lalu, penyidik Rusia juga meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Veronika Belotserkovskaya, seorang blogger dan penerbit Rusia yang tinggal di Prancis. Oleh penyidik Rusia, Belotserkovskaya dituduh menyebarkan informasi 'palsu' soal militer Rusia menargetkan warga sipil Ukraina, termasuk anak-anak. ● gul